

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:

Candra Simanjorang

190810195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

Skripsi

Untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar sarjana



Oleh

Candra Simanjorang

190810195

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Candra Simanjorang
Npm : 190810195
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa "SKRIPSI" yang saya buat dengan judul:

"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM"

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengatahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 30 Januari 2023

Yang menyatakan



Candra simanjorang
190810195

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA BATAM**

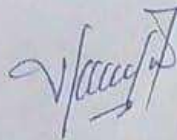
SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Candra Simanjorang
190810195**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 30 Januari 2023



**Vargo Christian L. Tobing, S.E., M.Ak
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh permasalahan kemampuan pemerintah daerah didalam mengendalikan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola, memajukan, dan juga memperluas pemungutan pajak daerah dalam rangka menciptakan daerah yang mandiri dan bertanggung jawab tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam pada tahun 2017-2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif kuantitatif merupakan metode analitik yang menggunakan perhitungan data keuangan untuk menjawab permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2017 adalah 74,13% dengan kategori kurang efektif. Pada tahun 2018, tingkat efektivitas pajak daerah adalah 87,10% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2019, tingkat efektivitas pajak daerah adalah 88,16% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2020, tingkat efektivitas pajak daerah adalah 61,69% dengan kategori kurang efektif. Dan pada tahun 2021, tingkat efektivitas pajak daerah adalah 68,90%. Rata-rata kontribusi pajak daerah pada tahun 2017-2021 adalah 74,91% dengan kategori sangat baik. Kontribusi pajak daerah pada tahun 2017 adalah 69,25%. Pada tahun 2018, kontribusi pajak daerah adalah 79,05%. Sedangkan kontribusi pajak daerah pada tahun 2019 adalah 82,16%. Dan pada tahun 2020 kontribusi pajak daerah adalah 72,81%. Dan pada tahun 2021 tingkat kontribusi pajak daerah adalah 71,27%. Rata-rata analisis efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2017-2021 senilai 75,99% dengan kategori kurang efektif. Dan rata-rata analisis kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 74,91% dengan kategori sangat baik.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Efektivitas Pajak Daerah, Kontribusi Pajak Daerah

ABSTRACT

This research faces the problem of the ability of local governments to optimally control the sources of Regional Original Revenue. The central government gives authority to local governments to manage, promote, and also expand local tax revenue collection within the framework of creating an independent and responsible region without depending on the central government. The purpose of this study was to examine the effectiveness and contribution of local taxes to the local revenue of Batam City in 2017-2021. The data analysis method used in this study is a quantitative descriptive analysis method. Quantitative descriptive analysis method is an analytical method that uses financial data calculations to answer problems that are relevant to the research objectives. The level of effectiveness of local taxes in 2017 was 74.13% in the less effective category. In 2018, the level of effectiveness of local taxes was 87.10% in the category of quite effective. In 2019, the level of effectiveness of local taxes was 88.16% in the category of quite effective. In 2020, the level of effectiveness of local taxes is 61.69% in the less effective category. And in 2021, the local tax effectiveness rate is 68.90%. The average local tax contribution in 2017-2021 is 74.91% in the very good category. Regional tax contribution in 2017 was 69.25%. In 2018, local tax contribution was 79.05%. Meanwhile, the regional tax contribution in 2019 was 82.16%. And in 2020 the local tax contribution is 72.81%. And in 2021 the regional tax contribution rate is 71.27%. The average analysis of the effectiveness of local taxes on local revenue for 2017-2021 is 75.99% in the less effective category. And the average contribution of the analysis to local revenue is 74.91% in the very good category.

Keywords: *Local Taxes, Effectiveness Of Local Taxes, Regional Tax Contributions*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Putera Batam Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M. I.Kom
3. Ketua program studi Akuntansi Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak
4. Bapak Vargo Christian L.Tobing, S.E., M.Ak selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan motivasi untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Seluruh Dosen dan Staff Universitas Putera Batam yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan penulis
6. Bapak Firmansyah selaku Pembina utama kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang telah mengizinkan penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah
7. Seluruh Staff yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang telah memberikan data untuk penelitian ini.
8. Keluarga terutama Orang tua yang senantiasa memberikan bantuan dan doa penuh kepada penulis
9. Teman-teman se-angkatan penulis yang selalu menyemangati hingga selesainya skripsi ini

10. Seluruh teman-teman PT. Tectron Manufacturing yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
11. Semua pihak yang telah membantu memberikan semangat dan doa kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 30 Januari 2023



Candra Simanjorang

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN OROSINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR RUMUS	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
1.6.1 Manfaat Teoritis	7
1.6.2 Manfaat praktis	8
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Dasar Penelitian	9
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah	10
2.1.1.2 Pajak Daerah	12
2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah	12
2.1.1.3.1 Pajak Daerah tingkat I atau Provinsi	12
2.1.1.3.2 Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota	14
2.1.2 Efektivitas Pajak Daerah	16
2.1.3 Kontribusi Pajak Daerah	17

2.2 Penelitian Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran	23
2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	24
2.3.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	24
2.4 Hipotesis	25
BAB III	
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Desain Penelitian	26
3.2 Operasional Variabel	26
3.2.1 Variabel Independen.....	27
3.2.1.1 Efektivitas Pajak Daerah.....	27
3.2.1.2. Kontribusi Pajak Daerah.....	28
3.2.2 Variabel Dependen	29
3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	29
3.3 Populasi dan Sampel.....	30
3.3.1 Populasi Penelitian	30
3.3.2 Sampel	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.4.1 Jenis Data.....	31
3.4.2 Sumber Data	32
3.4.3 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Metode Analisis Data	32
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	32
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	34
3.6.1 Lokasi Penelitian	34
3.6.2 Jadwal Penelitian	34
Bab IV	
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian.....	36
4.1.1 Analisis Efektivitas Pajak Daerah	36
4.1.2 Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD.....	40
4.2 Pembahasan	43
4.2.1 Efektivitas Pajak Daerah.....	43
4.2.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	45

BAB V	
KESIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	
Lampiran 4. Surat Balasan	
Lampiran 5. Bukti Turnitin	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka berpikir.....	25
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	26

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Target beserta Realisasi Pajak Daerah.....	5
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas.....	28
Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi.....	29
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian	35
Tabel 4. 1 Kriteria Efektivitas	37
Tabel 4. 2 Target beserta Realisasi Pajak Daerah Kota Batam 2017-2021	37
Tabel 4. 3 Kriteria Kontribusi.....	41
Tabel 4. 4 Realisasi Pajak Daerah dan Tingkat Kontribusi terhadap PAD Kota Batam 2017-2021 PAD.....	41

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 2. 1 Efektivitas Pajak Daerah.....	17
Rumus 2. 2 Kontribusi Pajak Daerah.....	18
Rumus 3. 1 Efektivitas Pajak Daerah.....	27
Rumus 3. 2 Kontribusi Pajak Daerah.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan saat ini dilaksanakan ditaraf nasional maupun ditaraf daerah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang dianut oleh warga Negara Indonesia tertulis dalam UUD 1945 berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, oleh karena itu kemajuan yang dilakukan didaerah juga merupakan aspek kemajuan dalam skala nasional (Rustendi, 2018). Pelaksanaan pembangunan daerah diharapkan mampu untuk mempercepat pengembangan pembangunan dalam upaya untuk memaksimalkan kemampuan daerah yang dimiliki daerah secara optimal. Untuk memperbaiki kehidupan warga negaranya, pemerintah harus mengutamakan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, adil, keistimewaan, dan juga kekuasaan dan kemajemukan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan potensi lokal daerah, maka dibutuhkan biaya yang besar.

Kemakmuran masyarakat tergantung pada pemerintah daerahnya, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan objek-objek Pendapatan Asli Daerahnya, karena PAD merupakan suatu penunjang untuk mengukur pencapaian dari pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diterima oleh suatu daerah dan dipungut berdasarkan aturan yang berlaku dan digunakan kembali untuk keperluan daerahnya. Apabila PAD yang diterima

oleh suatu daerah besar, maka kemampuan pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan daerahnya akan tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa PEMDA telah mampu melaksanakan otonomi daerahnya. Begitu juga sebaliknya, apabila PAD yang diterima oleh PEMDA kecil maka pelaksanaan otonomi daerah belum maksimal (Rustendi, 2018).

Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan sebagai ukuran melihat prospek suatu daerah dan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan faktor yang sangat penting dalam mengukur hasil kerja pemerintah didalam melaksanakan kebijakan daerahnya. Besaran nilai dari PAD diharapkan mampu meminimalisir tingkat pendanaan pemerintah daerah terhadap anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat agar terciptanya otonomi daerah yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan rencana pembangunan suatu daerah dalam rangka mempercepat pembangunan dan juga memaksimalkan potensi yang dimiliki. Usaha peningkatan PAD yaitu dengan memaksimalkan efektivitas pemungutan pajak dan iuran dengan memaksimalkan sumber daya yang ada dan mencari aliran pendapatan yang baru yang potensial. Pendapatan pajak daerah diharapkan dari periode ke periode harus mengalami kenaikan. Hal ini diharapkan supaya tidak adanya kesenjangan pembangunan antar daerah. Dengan begitu pembangunan antar daerah dapat berjalan seimbang.

Efektivitas pajak daerah adalah penilaian kinerja pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh otoritas pajak daerah pada satu periode anggaran, untuk menilai apakah pemungutan pajak daerah tersebut sudah efektif atau tidak yang dapat diketahui dengan melihat persenan pendapatan pajak daerah yang sudah

teralisasi dibanding dengan sasaran yang sudah ditentukan (Nooraini & Yahya, 2018). Apabila jumlah pajak yang diterima sudah mencapai ataupun melebihi dari sasaran yang ditetapkan, maka dikatakan efektivitas pemungutan pajaknya telah tercapai, dan sebaliknya. Jika jumlah pajak yang diterima belum memenuhi target yang ditetapkan, maka dapat dikemukakan bahwa efektivitas penerimaan pajaknya belum maksimal. Efektivitas pajak daerah mengindikasikan kemampuan PEMDA dalam menghimpun pajak daerah sesuai dengan jumlah pendapatan pajak daerah yang sudah ditetapkan. Semakin efektif kinerja pemungutan pajak daerah, maka akan semakin membantu pemerintah daerah dalam mencapai realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Efektivitas merupakan sejauh mana keberhasilan dari suatu target yang sudah ditetapkan pada awalnya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah merupakan jumlah yang taksir berdasarkan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Apabila persentase pajak daerah minimal 1 atau 100% maka pajak daerah dikatakan efektif, yang didapat dari perhitungan interpretasi numerik dengan menggunakan kriteria *tax effectiveness* (Yakub et al., 2022). Semakin tinggi rasio target yang dicapai, akan tinggi juga efektivitasnya. Dalam hal memperoleh target efektivitas yang telah ditetapkan, maka petugas pemungutan pajak daerah diharapkan mampu melakukan tugasnya secara maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020), efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah orang yang membayar pajak serta memiliki kesadaran akan kewajiban pajaknya.

Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauh keterlibatan daerah tersebut dalam mendukung PAD. Apabila kontribusi pajak daerah lancar, maka akan lancar juga pembangunan yang akan diterima oleh daerah tersebut. Kontribusi pajak daerah merupakan keterlibatan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang bisa dilihat berdasarkan perbandingan antara penerimaan pajak daerah dengan total PAD pada suatu tahun anggaran (Nooraini & Yahya, 2018). Kontribusi pajak daerah turut serta dalam peningkatan PAD dan juga berperan penting dalam pembangunan daerah. Dikatakan berperan penting dikarenakan, jika kontribusi pajak daerah tinggi maka akan berdampak terhadap pembangunan daerah. Dimana fungsi dari pajak daerah yang diterima oleh suatu daerah adalah untuk pembangunan daerah tersebut. Dalam konteks ini, kontribusi pajak daerah berjalan bersamaan dengan PAD atau dengan kata lain saling ketergantungan.

Semakin tinggi kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah maka akan tinggi juga pendapatan asli daerah, begitupun sebaliknya. Apabila kontribusi pajak daerah rendah terhadap pendapatan asli daerah maka akan rendah juga pendapatan asli daerah tersebut. Dari hal tersebut, kontribusi pajak daerah diharapkan mampu secara maksimal membantu pendapatan asli daerahnya supaya sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan guna membantu pembangunan daerahnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rosa et al., 2020) kontribusi pajak daerah terhadap PAD cukup baik, dikarenakan adanya system mekanisme kontrol kontribusi daerah terhadap PAD.

Tabel 1. 1 Target beserta Realisasi Pajak Daerah

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2017	874.412.619.360,00	648.218.274.622,87	74.13%
2.	2018	970.977.686.467,00	845.697.306.042,89	87.10%
3.	2019	1.059.951.387.421,80	934.458.907.796,97	88.16%
4.	2020	1.225.272.547.554,19	755.879.588.525,35	61.69%
5.	2021	1.156.408.239.166,00	796.767.486.336,17	68.90%

Sumber: <https://siependa.batam.go.id/>

Data diatas merupakan proyeksi pemungutan pajak daerah Kota Batam tahun 2017-2021. Dari data diatas, menunjukkan target yang sudah ditentukan, realisasinya belum terlaksana secara maksimal. Dari data tersebut menunjukkan bahwa target atau sasaran yang diharapkan atas pajak daerah pada setiap periodenya berubah-ubah, tetapi hal tersebut juga terjadi dengan realisasi yang terjadi, yang dimana terkadang mengalami penurunan. Pada tahun 2017, persentasi dari realisasi Pajak Daerah senilai 74.13%. pada tahun 2018, persentasi dari realisasi pajak daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sebesar 87.10%. Pada tahun 2019, realisasi PAD mengalami kenaikan yaitu sebesar 88.16%. Realisasi pajak daerah secara persentase turun signifikan ditahun 2020 yaitu sebesar 61.69%. Dan pada tahun 2021, persentasinya kembali mengalami kenaikan sebesar 68.90%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus bekerja semaksimal mungkin supaya dapat memenuhi target yang sudah ditentukan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan juga uraian masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti mengambil judul tentang “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI KOTA BATAM”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini, adapun yang menjadi identifikasi masalah adalah

1. Selama tahun 2017-2021 target anggaran dari pendapatan asli daerah Kota Batam tidak tercapai
2. Pemungutan pajak daerah yang tidak efektif mengakibatkan realisasi dari Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal, karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak, juga birokrasi yang terkesan terkadang membeli-belit dan juga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pajak daerah terhadap kemajuan daerah.
3. Kontribusi pajak daerah belum maksimal sehingga realisasi dari Pendapatan Asli Daerah belum maksimal

1.3 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Periode dalam penelitian ini adalah dari tahun 2017-2021
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah
3. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah
4. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Batam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?
2. Bagaimanakah Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisa Efektivitas pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?
2. Untuk menganalisa Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Batam tahun 2017-2021?

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan baik secara praktis maupun secara teoritis

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis dan untuk pengembangan pengetahuan, terkhususnya dibidang Pendapatan Asli Daerah

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan maupun perbandingan dalam pengembangan penelitian selanjutnya, penelitian dibidang Pendapatan Asli Daerah.

1.6.2 Manfaat praktis

Dalam manfaat praktisnya, manfaat penelitian ini adalah

1. Penulis

Bermanfaat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Batam

2. Bagi Universitas Putera Batam

Hasil dari analisis ini akan memberikan sumber daya tambahan untuk penelitian selanjutnya di Universitas Putera Batam

3. Bagi pihak Pemerintah kota Batam

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai pertimbangan untuk penilaian kinerja pemerintah, termasuk tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Batam sehingga pemerintah dapat memaksimalkan realisasi pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Maharani & Sari, 2021) definisi dari Pendapatan Asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan di daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan dalam hal mengatur dana pembangunan melalui sumber penerimaan negara, sedangkan pada pemerintah daerah masih tergantung pada pemerintahan pusat karena terhalang keterbatasan sumber penerimaan. Sedangkan menurut (Jamain & Mahadi, 2021) Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Zahra et al., 2022) Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah. Karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah.

Menurut (Marlina & Pratiwi, 2021) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam hal menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri yang harus ditingkatkan secara terus menerus agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pemerintah dan aktivitas pembangunan yang setiap tahun

mengalami peningkatan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat terlaksanakan.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari bidang pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Uma, 2019). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan aturan dan perundang-undangan yang berlaku (Lidya Rikayana, 2018). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah (Al-Anshori et al., 2020). Jika suatu daerah mampu menghasilkan lebih banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungannya pada dana dari pusat akan berkurang. Semakin kecil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, maka tingkat ketergantungannya pada dana dari APBD yang diberikan oleh pemerintah pusat akan besar.

Dari beberapa pengertian mengenai pendapatan asli daerah diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh di suatu daerah, dikenakan pajak dan dikumpulkan sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku dan kemudian digunakan kembali untuk kemajuan daerah itu sendiri untuk pengembangan lebih lanjut.

2.1.1.1 Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Ada beberapa sumber pendapatan daerah menurut (Safuridar et al., 2019) yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

a. Hasil pajak daerah

Merupakan sebuah aturan dimana subjek atau orang dikenakan beban pajak perlu membuat pajak atau kontribusi keuangan pemerintah tidak menerima tinbal balik berdasarkan kontribusi mereka. Aturan telah menegaskan bahwa dana yang dikumpulkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan di daerah

b. Hasil retribusi daerah

Ini merupakan iuran yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari penerbitan izin kepada individu dan entitas.

c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan hasil pendapatan daerah atas hasil penyertaan modal

2. Dana perimbangan

Merupakan sumber pendapatan suatu daerah yang asalnya dari APBN, yang dimana tujuannya adalah guna mendukung pelaksanaan kewenangan daerah didalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik

3. Pinjaman daerah

Merupakan sumber daya bagi pemerintah daerah untuk digunakan dalam mendanai pembangunan daerah melalui investasi untuk memajukan daerahnya.

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dari beberapa sumber pendapatan yang telah disebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting, PAD terkadang digunakan sebagai proksi sejauh mana suatu daerah mampu menjalankan pemerintahannya sendiri.

2.1.1.2 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pengeluaran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Zulfikar & Rahman, 2019). Sedangkan menurut (Setiono, 2018) Pajak Daerah adalah Pajak yang dikutip di tingkat daerah dipergunakan untuk mendanai operasional pemerintah daerah dan pembangunan infrastruktur, dan dapat dikenakan kepada individu atau badan usaha yang pemungutannya dapat dipaksakan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. Dari beberapa pengertian yang telah dijabarkan dapat diambil kesimpulan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditentukan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), dan dipergunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

2.1.1.3.1 Pajak Daerah tingkat I atau Provinsi

Pajak Daerah tingkat I atau Provinsi terdiri atas,

1. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan atas hak istimewa mengemudikan atau memiliki kendaraan bermotor. Mesin dengan bagian dan roda bergerak yang digerakkan disepanjang jalan raya dengan menggunakan mesin pembakaran disebut sebagai kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Salah satunya adalah biaya yang terkait dengan pengalihan kepemilikan kendaraan dari penjualan, penukaran, pemberian, warisan, atau penggabungan usaha.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Penggunaan bensin, solar, dan bahan bakar kendaraan bermotor lainnya dikenakan pajak yang dikenal dengan pajak energi untuk mobil dan truk. Bahan bakar yang digunakan baik itu bahan bakar cair dan gas sama-sama digunakan secara kolektif disebut sebagai "bahan bakar kendaraan bermotor".

4. Pajak Air Permukaan

Yang dimaksud dengan "pajak air permukaan" adalah pungutan yang dikenakan atas tindakan mengambil ataupun menggunakan air permukaan. Istilah "air permukaan" mengacu pada badan air yang ada di atau dekat permukaan tanah, tidak termasuk air di laut ataupun di darat.

5. Pajak rokok

Pajak rokok adalah pajak yang dipungut Pemerintah atas rokok dalam bentuk cukai.

2.1.1.3.2 Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

Pajak daerah tingkat II atau pajak Kabupaten/Kota terdiri atas,

1. Pajak Hotel

Sederhananya, industri perhotelan memungut pajak atas nilai layanan yang mereka tawarkan kepada tamu. Motel, losmen, pondok pariwisata, wisma pariwisata, rumah tamu, rumah penginapan, dan sejenisnya termasuk dalam payung istilah "hotel", seperti halnya rumah kos dengan sebelas atau lebih tempat tidur.

2. Pajak Restoran

Pajak yang dibayarkan di restoran adalah untuk layanan yang mereka berikan. Restoran, kafetaria, kantin, kios, bar, dan tempat serupa, serta layanan katering dan katering, termasuk dalam istilah umum "restoran".

3. Pajak Hiburan

Penyediaan hiburan dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak hiburan". Dalam konteks ini, "hiburan" mengacu pada segala sesuatu yang menarik perhatian banyak orang dan memerlukan biaya.

4. Pajak Reklame

Sederhananya, pajak iklan adalah pungutan atas penyebaran pesan promosi. Periklanan dapat mengambil bentuk apa pun yang dapat dilihat, dibaca, didengar, disentuh, atau dialami orang sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan, mengadvokasi, mempromosikan, atau menarik perhatian publik terhadap suatu produk, layanan, orang, ataupun entitas.

5. Pajak Penerangan Jalan

pajak penerangan jalan adalah pemanfaatan energi listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Penambangan mineral dan batuan bukan logam dikenakan pajak yang disebut "pajak mineral dan batuan bukan logam". Sumber daya ini dapat ditemukan di kerak bumi atau di permukaannya.

7. Pajak Parkir

Fasilitas parkir di luar badan jalan, baik dijalankan sebagai bagian dari perusahaan yang lebih besar atau sebagai usaha komersial terpisah, dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak parkir".

8. Pajak Air Tanah

Ketika air tanah diambil dan/atau digunakan, pajak dikenakan. Istilah "air tanah" mengacu pada lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah permukaan bumi.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Praktek mengumpulkan dan mengeksploitasi sarang burung walet secara komersial dikenai "pajak sarang burung walet".

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Terkecuali untuk area yang digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, semua properti dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh orang atau perusahaan dikenakan pajak yang dikenal sebagai "pajak bumi dan bangunan pedesaan

dan perkotaan". Daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial kabupaten/kota semuanya membentuk permukaan bumi. Struktur yang dibangun untuk bertahan lama dan berakar di tanah atau ditempelkan secara permanen ke garis pantai atau badan air disebut bangunan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan pajak atas pembelian aset tersebut. Seseorang atau organisasi dapat memperoleh hak hukum untuk menggunakan tanah dan/atau membangun bangunan melalui berbagai cara hukum. Hak milik hak atas properti tetap adalah hak atas properti tetap yang dimiliki oleh barang tertentu, seperti halnya yang sudah dijelaskan pada undang-undang dan peraturan properti tetap.

2.1.2 Efektivitas Pajak Daerah

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective*, yang artinya manjur atau berhasil dilakukan. Kata "efektif" ini juga memiliki arti sesuatu yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap apa yang sudah ditentukan. Pekerjaan dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Untuk mencapai tujuannya, semua organisasi dan lembaga membutuhkan visi dan misi yang jelas. Efektivitas mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam hal memaksimalkan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditargetkan sebelumnya menurut (Brahmana & Situmorang, 2021).

Pengukuran efektivitas suatu lembaga ataupun organisasi didasarkan pada seberapa besar kemampuannya untuk mewujudkan hasil yang diharapkan. Untuk berhasil, sebuah institusi harus mampu melaksanakan rencananya dan

mencapai tujuannya agar berjalan dengan efektif. Efektivitas mengindikasikan kapabilitas pemerintah daerah untuk memungut pajak berdasarkan target yang ditetapkan. Tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dapat diharapkan ketika proporsi tujuan yang lebih besar dicapai. Pada tingkat pencapaian ini, pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah apa yang akan diambil kedepannya guna mempertahankan atau pun meningkatkan tingkat ke efektif an dari pajak daerah.

Berdasarkan hal diatas, efektivitas pajak daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Rumus 2. 1 Efektivitas Pajak Daerah

Dalam analisis ini, peneliti berusaha untuk memahami bagaimana sistem pemungutan pajak daerah Kota Batam apakah sudah efektif atau belum. Pemungutan Pajak Daerah dikatakan efektif apabila mencapai persentase 100%.

2.1.3 Kontribusi Pajak Daerah

Kata "Kontribusi" berasal dari bahasa Inggris "*Contribute*" dan "*Contribution*," yang masing-masing menyiratkan "untuk mengambil bagian ", "untuk membenamkan diri", dan "untuk menyumbang", sejauh mana sesuatu telah berkontribusi terhadap pajak daerah dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Fungsi primer dan sekunder Pajak melayani dua fungsi utama bagi pemerintah kota: membiayai anggaran dan menegakkan aturan (fungsi pengaturan). Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat dan yang digunakan oleh pemerintah di tingkat lokal yaitu untuk mengisi kesenjangan layanan yang tidak dapat diisi oleh sektor swasta; layanan publik ini didanai sebagian oleh

perpajakan. Karena besarnya jumlah uang pajak, maka jelas dari fakta tersebut pajak sangat penting, terutama untuk pembangunan daerah, yang mendorong pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas daerah.

Masyarakat pada umumnya mendeskripsikan kontribusi merupakan sebagai peran atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu (Mintalangi & Latjandu, 2019). Selanjutnya menurut (Ariyanti & Yudhaningsih, 2020) Tujuan dari analisis kontribusi adalah untuk memastikan berapa banyak sumbangan dari pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Analisis membandingkan aktualisasi antara pajak daerah yang diterima dengan pendapatan asli daerah yang memungkinkan untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dan Peran Pajak Daerah diukur dengan analisis ini. Rumus berikut dapat digunakan untuk memperkirakan besaran Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Batam:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 2. 2 Kontribusi pajak daerah

Kontribusi pajak daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang dimana sumbernya dari pajak terhadap bagiannya dari APBD.

Dengan begitu, kontribusi dari setiap komponen PAD, khususnya pajak daerah sangat dibutuhkan dan berperan penting terhadap penerimaan dari PAD suatu daerah otonom yang kemudian dapat disebut sebagai suatu perkumpulan badan atau organisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dan berpegang pada penelitian terdahulu yang memiliki variabel yang sama, penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lovianna & Rahmi, 2022), yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (studi pada Bapenda DKI Jakarta tahun 2016-2020), dimana hasil dari penelitiannya adalah Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2016 hingga 2020 termasuk dalam kategori efektif meskipun cenderung fluktuatif, hal ini mengartikan bahwa pajak daerah telah cukup efektif dalam berkontribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saat ini adalah perbedaan lokasi dan tahun penelitian. Selanjutnya (Pratama et al., 2019) juga melakukan penelitian yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017. Hasil penelitiannya adalah bahwa hasil analisis efektivitas pemungutan pajak daerah selama tahun 2013-2017 memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Mayoritas tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah perbedaan lokasi dan tahun penelitian.

Penelitian juga dilakukan oleh (Ul'hasanah et al., 2021) yang berjudul Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016 - 2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel trend, dan perbedaan lainnya adalah tahun penelitian dan juga lokasi.

Selanjutnya penelitian juga dilakukan oleh (Tries et al., 2021) yang berjudul Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. Hasil dari penelitiannya adalah tingkat efektifitas Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif. Perbedaaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti mengangkat variabel retribusi daerah dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Etika et al., 2021) yang berjudul Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Hasil dari penelitiannya adalah Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tahun 2016-2020 sebesar 25,79% dengan kriteria sedang. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel retribusi daerah dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Djafar, 2022) yang berjudul Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja, dimana hasil penelitiannya adalah Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten TanaToraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31%. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel pertumbuhan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dan perbedaan lainnya adalah tahun dan tempat penelitian.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Safuridar et al., 2019) yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur, dimana hasil penelitiannya adalah Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9%. Perbedaaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengangkat variabel retribusi daerah,dan perbedaan lainnya adalah tempat dan tahun penelitian.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Rustendi, 2018) yang berjudul Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten bekasi), dimana hasil penelitiannya adalah Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata prosentase yaitu 0,74% dengan kategori sangat kurang.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1.	(Lovianna& Rahmi, 2022)	Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Bapenda DKI Jakarta Tahun 2016-2020)	Hasil perhitungan menjelaskan pendapatan dan perhitungan efektivitas pajak daerah dari tahun 2016-2020 yang menunjukkan hasil tingkat efektivitas pajak daerah dalam kategori efektif dengan persentase rata-rata 97,19%.
2.	(Pratama et al., 2019)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 – 2017	Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa efektivitas pajak daerah selama tahun 2013-2017 mayoritas memiliki tingkat efektivitas tergolong sangat efektif, indikatornya adalah realisasi pemungutan pajak daerah telah melampaui target yang ditetapkan APBD dan rasio efektivitasnya mencapai lebih dari 100%.
3.	(Ul'hasanah et al., 2021)	Analisis Efektivitas, Trend, dan Kontribusi Pajak Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020	Hasil dari analisis efektivitas pajak dan retribusi daerah menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2016-2020 termasuk dalam kriteria sangat efektif
4.	(Tries et al., 2021)	Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah dan retribusi Daerah pada Kabupaten Seram Bagian Barat adalah efektif
5.	(Etika et al., 2021)	Analisis Tingkat Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan	Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi

		Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung	Lampung tahun 2016-2020 sebesar 25,79% dengan kriteria sedang
6.	(Djafar, 2022)	Analisis Kontribusi, Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja	Hasil penelitian ini menunjukkan Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten TanaToraja dikategorikan sangat kurang dimana presentase rata-rata mencapai angka 9,31%
7.	(Safuridar et al., 2019)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli di Daerah Kabupaten Aceh Timur	Rata-rata kontribusi pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sebesar 14,9%.
8.	(Rustendi, 2018)	Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (studi kasus pada dinas pendapatan daerah kabupaten bekasi)	Kontribusi penerimaan pajak Daerah tahun 2010-2016 di Kabupaten Bekasi dengan cara membandingkan realisasi pajak Daerah dengan pendapatan asli daerah. Dari perhitungan ini, dapat dilihat pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan rata-rata persentase yaitu 0,74% dengan kategori sangat kurang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran mencirikan interaksi dan hubungan antar setiap variabel. Penelitian yang dilakukan saat untuk ini menganalisa efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD.

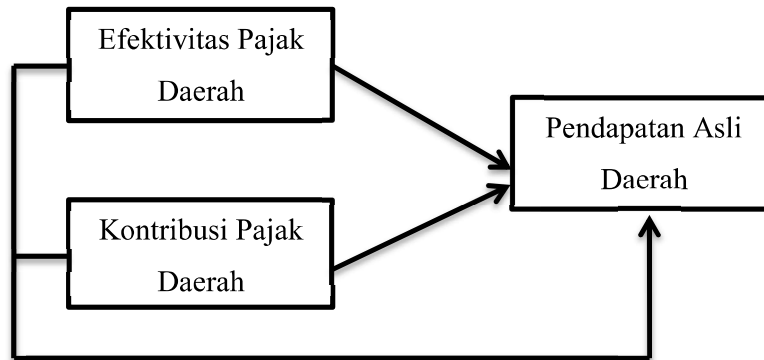
2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas mengindikasikan sejauh mana tingkat keberhasilan dari target dapat dicapai. Efektivitas pajak daerah merupakan nilai yang diperoleh dari rasio penerimaan pajak yang sebenarnya terhadap penerimaan pajak yang diinginkan. Apabila rasio pajak daerah minimal 1, atau 100%, itu dianggap efektif. Hal ini ditentukan dengan menggunakan interpretasi matematis berdasarkan standar efektivitas pajak daerah. Persentase keberhasilan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ini sesuai dengan temuan penelitian oleh (Brahmana & Situmorang, 2021) yang berjudul “ Analisis Efektivitas dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karo tahun 2015-2020” yang dimana berdasarkan penelitiannya hasilnya adalah efektivitas dari pajak daerah sangat efektif.

2.3.2 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi merupakan suatu keterlibatan didalam mencapai suatu tujuan. Kontribusi pajak daerah merupakan seberapa jauh keterlibatan daerah tersebut dalam mendukung pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi kontribusi dari pajak daerah maka akan tinggi juga pendapatan asli daerahnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Al-Anshori et al., 2020) yang berjudul “kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang periode tahun 2013-2018”, yang dimana hasilnya secara umum kontribusi dan pajak daerah memiliki pengaruh yang besar dan berarti terhadap pendapatan asli daerah

Berdasarkan keterangan diatas maka disimpulkan bahwa kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan praduga sementara yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan teori, namun secara empiris keabsahannya harus perlu dibuktikan (Chandrarini, 2017). Hal penting yang harus diperhatikan ketika memformulasikan hipotesis adalah bahwa hipotesis tersebut harus dapat diuji.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1) : Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah efektif.

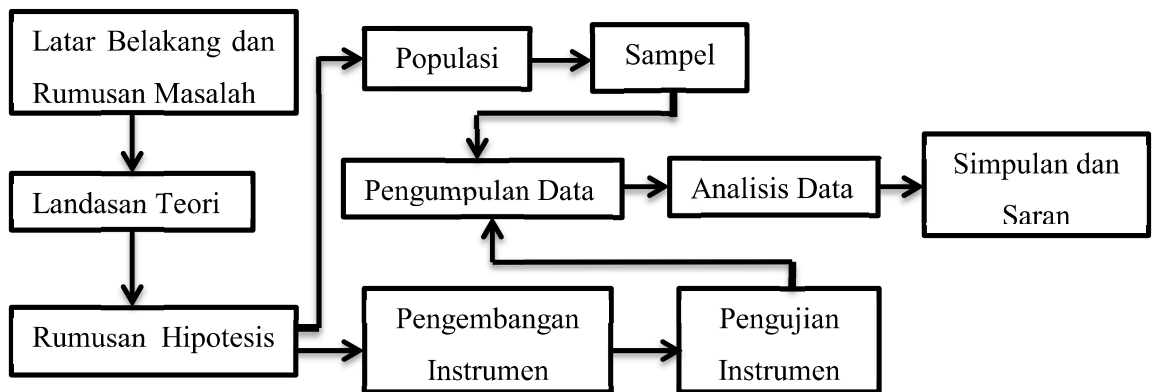
Hipotesis 2 (H2) : Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) telah efektif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan seperti peta jalan, ini membantu peneliti secara akurat mengarahkan proses penelitian dengan cara yang konsisten dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Untuk lebih jelasnya, pendekatan penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang mengandalkan analisis data numerik dan statistik. Hubungan sebab akibat dibangun antara variabel dalam pendekatan ini (hubungan sebab dan akibat). Sebagai hasil dari hubungan ini, jelaslah bahwa kejadian pertama adalah katalis untuk kejadian kedua.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah variabel penelitian yang dimaksudkan untuk memahami arti dari setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal darimana saja. Sebelum analisis, instrumen, atau sumber pengukuran apa pun, variabel operasional digunakan

untuk mendapatkan pemahaman umum tentang arti semua variabel penelitian. Untuk mendefinisikan variabel kajian dalam kerangka dimensi dan indikator, diperlukan operasionalisasi. Tujuan lain adalah untuk membantu melihat dari mata ke mata dan mencegah kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul. Pada penelitian ini memiliki dua variabel independen dan satu variabel dependen.

3.2.1 Variabel Independen

3.2.1.1 Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas mengindikasikan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak diukur dengan jumlah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya.

Peneliti menggunakan rumus untuk menentukan seberapa efektif pajak daerah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\% \quad \text{Rumus 3.1 Efektivitas Pajak Daerah}$$

Ketika rasio perhitungan efektivitas pajak daerah menghasilkan persentase yang tinggi, maka dapat dikemukakan bahwa pemungutan pajak daerahnya sudah efektif. Akan tetapi begitu pula sebaliknya, jika persentase perhitungan pajak daerahnya kecil, maka pemungutan pajak daerah tidak efektif. Pemungutan pajak daerah dikatakan efektif apabila persentasenya diatas 100%, atau jika realisasinya telah memenuhi atau melampaui sasaran tahunannya di setiap periode.

Efektivitas pajak daerah diperlukan untuk menilai hubungan antara hasil pemungutan pajak daerah dengan tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan

sebelumnya. Efektivitas pajak daerah berusaha mengukur rasio pencapaian; semakin besar hasil yang dicapai, maka semakin besar juga tingkat efektivitasnya. Akan tetapi apabila hasil yang dicapai kecil, maka akan semakin kecil juga tingkat efektivitasnya.

Tabel 3. 1 Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Seperti dapat dilihat pada tabel, tingkat keberhasilan lebih dari 100% dianggap sangat efektif, sedangkan tingkat keberhasilan kurang dari 60% dikatakan tidak efektif.

3.2.1.2. Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah merupakan sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap PAD. Kontribusi pajak daerah perlu diketahui guna mencari tahu seberapa besar keterlibatan yang diberikan oleh pajak daerah kepada PAD. Apabila tingkat kontribusi yang diberikan oleh pajak daerah tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pajak daerah memberikan peningkatan terhadap PAD. Analisis kontribusi pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak daerah ditentukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus 3.2 Kontribusi Pajak Daerah

Kriteria kontribusi pajak daerah disajikan dalam table berikut:

Tabel 3. 2 Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,0-10%	Sangat Kurang
10,10%- 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10 – 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Dari table tersebut menjelaskan bahwa apabila persentase yang dicapai mencapai >50% maka dapat dikategorikan sangat efektif. Dan apabila persentasenya <10%, maka dikatakan sangat kurang. Berhubungan dengan pajak daerah, analisis kontribusi diperlukan untuk mengetahui ataupun untuk mengukur bagaimana kontribusi suatu variabel pada variabel lainnya. Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kota Batam akan diketahui bentuk penyerapan terhadap pendapatan asli daerah tersebut dengan dilakukannya analisis kontribusi.

3.2.2 Variabel Dependen

3.2.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari objek-objek pajak daerah yang berada dalam wilayah hukumnya sendiri yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu mandiri secara finansial. Agar dana daerah dapat berkontribusi secara efektif, maka dapat dilakukan dengan cara memajukan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dan pihak lain yang

terlibat dalam pengelolaan dana daerah harus dapat menggunakan dana daerah secara efektif dan efisien (Brahmana & Situmorang, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah meningkat sebanding dengan menurunnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pusat. Sebaliknya, jika suatu daerah menerima lebih sedikit Pendapatan Asli Daerah (PAD), berarti daerah tersebut lebih bergantung pada dana pemerintah yang diberikan oleh pusat. Karena hal tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kekuasaan pada daerah dalam hal mengendalikan urusan otonominya sendiri.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekelompok komponen dengan ciri-ciri tertentu dan digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan (Chandrarin, 2017). Orang, manajer, auditor, bisnis, atau apapun yang menarik untuk diteliti merupakan komponen dari populasi. Dalam populasi yang diteliti bukan hanya jumlah objek dan subjek, tetapi juga semua atribut yang termasuk didalamnya. Populasi berfungsi sebagai menghubungkan semua karakteristik yang telah dibahas sebelumnya.

Populasi untuk analisis ini berdasarkan proyeksi dan realisasi dari laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kota Batam tahun 2017-2021.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan sekelompok individu yang mewakili populasi (Chandrarin, 2017). Karakteristik sampel yang diambil harus sesuai juga dengan ciri-ciri populasi secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode sampel

acak berdasarkan letak wilayah (Cluster Random Sampling). Sampel dipilih dari populasi penelitian berdasarkan wilayah. Proyeksi PAD kota Batam dan penerimaan pajak daerah tahun 2017-2021 menjadi objek dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Jenis Data

Data menurut cara memperolehnya terdiri atas:

1. Data Primer

Menurut (Chandrarini, 2017) data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari orang atau kelompok yang sedang dipelajari. Data yang belum diubah dari bentuk aslinya disebut data primer. Data primer yang dibutuhkan berupa data mengenai pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kota Batam.

2. Data Sekunder

Menurut (Chandrarini, 2017) data yang sudah dimanfaatkan atau dipublikasikan disebut data sekunder, dan berasal dari pihak atau organisasi lain. Peneliti tidak perlu lagi memverifikasi keakuratan dan keaslian data sebelum menggunakan atau menerbitkannya.

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data sekunder. dikarenakan data yang akan diolah telah jelas penggunaannya ataupun sudah diterbitkan sebelumnya, maka dengan demikian peneliti tidak diharuskan untuk melakukan uji reliabilitas dan validitas terhadap data yang akan diolah karena sudah digunakan atau telah dipublikasikan.

3.4.2 Sumber Data

Data untuk analisis ini bersumber dari Laporan Tahunan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan factor yang sangat penting dalam keberhasilan suatu penelitian. Pemilihan metode pengumpulan data yang tepat akan memastikan hasil yang andal. Yang dimaksud dengan “data” adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dengan sendirinya dan harus diolah lebih lanjut. Badan Pendapatan Daerah Kota Batam bertanggung jawab untuk mengalokasikan dana untuk proyek-proyek daerah digunakan sebagai sumber informasi sekunder untuk penelitian ini. Selain itu, penelitian didukung oleh literatur berupa buku, jurnal, artikel, dan teori-teori yang relevan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan data yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini. Metode merupakan pendekatan sistematis atau urutan langkah-langkah yang digunakan untuk menyelidiki kebenaran terverifikasi dari teori ilmiah. Penelitian adalah kerja ilmiah, oleh karena itu perlu dilakukan secara sistematis, terorganisir dengan baik, baik dari segi prosedurnya maupun pendekatannya terhadap materi pelajaran. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menawarkan gambaran rinci tentang suatu topik atau fenomena hubungan yang diteliti (Primahad & Kurniawan, 2021). Sedangkan menurut (Marlina & Pratiwi, 2021) Mendeskripsikan variabel, gejala, atau kondisi dengan sengaja

adalah inti dari penelitian deskriptif. Dengan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap tentang fenomena tertentu.

Penelitian ini akan mengkaji efektivitas serta kontribusi Pajak Daerah dan terhadap PAD Kota Batam tahun 2017-2021. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah Kota Batam tahun 2017-2021. Analisa data diperlukan untuk mengkaji tiap-tiap karakter yang diperlukan, yaitu dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan kontribusi untuk mengetahui pajak daerah atas pendapatan asli daerah dan tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah.

Tahapan yang dilakukan dalam analisis deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh apa yang menjadi tentang topik studi dan masalah yang sudah ada
2. Menentukan besarnya realisasi dengan menggunakan informasi dari Laporan Realisasi Anggaran, hitung jumlah realisasi pajak daerah periode 2017-2021
3. Informasi Laporan Realisasi Anggaran digunakan untuk menghitung total realisasi PAD pada periode 2017-2021.
4. Menentukan persentasi efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD dengan cara membagi realisasi pajak daerah pada PAD dikalikan 100% dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak daerah}}{\text{Target pajak daerah}} \times 100\%$$

Rumus kontribusi pajak daerah terhadap PAD

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

5. Tetapkan kriteria untuk mengambil penilaian kontribusi berdasarkan skala dari "sangat kurang" hingga "kurang" hingga "sedang" hingga "cukup baik" hingga "baik" dan juga "sangat baik".
6. Simpulkan dan berikan perubahan yang menurut peneliti akan membantu dalam menyelesaikan masalah.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batam yang beralamat di Jalan Engku Putri No. 17, Teluk Tering, Kec Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian ini di sini karena data yang dibutuhkan sudah tersedia, yang akan memberikan keringanan untuk melakukan penelitian.

3.6.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih satu semester yang dihitung mulai September 2022 sampai dengan selesainya tugas penyusunan skripsi ini. Berikut merupakan jadwal penelitian yang sudah disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

Keterangan	2022																2023			
	Sept				Okt				Nov				Des				Jan			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■	■																		
Studi Kepustakaan			■	■																
Pengajuan Bab 1					■	■	■	■												
Pengajuan Bab 2									■	■	■	■								
Pengajuan Bab 3													■	■	■	■				
Pengelolaan Data																	■	■	■	■
Kesimpulan																			■	■
Saran																			■	■
Penyerahan Skripsi																			■	■